



## Dermaga Kapal Pesiar akan Dibangun di Lovina

# Pemprov Bali Rancang "Feasibility Study"

**Singaraja (Bali Post) -**

Potensi Pantai Lovina di Desa Kalibukbuk, Kabupaten Buleleng dalam mendukung pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor kepariwisataan makin dikembangkan. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi (Dishubinkom) Provinsi Bali berencana meningkatkan fungsi di kawasan dermaga jetty Lovina dengan mengembangkannya menjadi dermaga kapal pesiar. Tim pemantauan turun meninjau kondisi di lapangan dan dinilai layak untuk membangun dermaga sebagai tempat bersandarnya kapal pesiar dari berbagai negara.

Kabid Perhubungan Laut Dishubinkom Provinsi Bali Ketut Dana mengatakan, dermaga yang berada di Lovina telah diserahkan oleh pusat ke Pemkab Buleleng. Selanjutnya, Pemkab Buleleng menyerahkannya ke Pemprov Bali sehingga dermaga ini kini berada di bawah Pemprov Bali. "Awalnya memang rencananya dikelola Pemkab Buleleng, tapi kawasan di sepanjang pantai tersebut kini menjadi ranah Pemprov Bali. Dermaga yang terlalu tinggi ini, akhirnya tidak bisa digunakan sebagai tempat bersandarnya kapal-kapal kecil. Ke depan kami akan tambahkan ponton atau sejenis dermaga mengapung," ujar Dana ketika dikonfirmasi di Lovina, Rabu (30/9) kemarin.

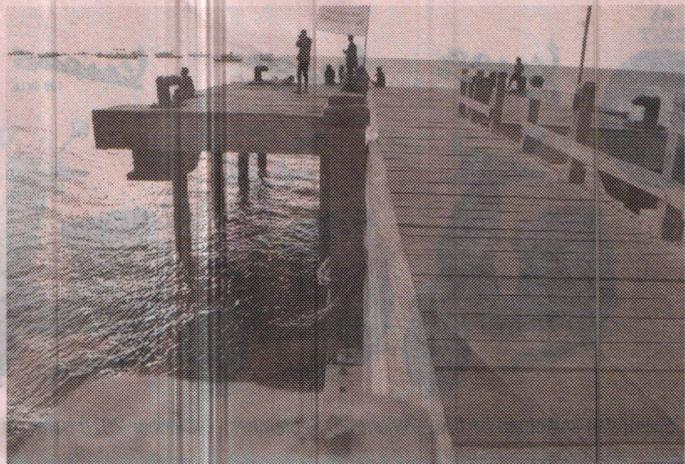
Dana menambahkan, dermaga ke depan akan memiliki nilai tambah terhadap kawasan di Lovina. Pemprov Bali memiliki kewenangan setelah dermaga diserahkan ke provinsi. Pihaknya akan melakukan studi lanjut menyangkut

kedalaman laut sebelum dermaga kapal pesiar dibangun. "Rencananya, kami akan membuat dermaga jetty ini untuk tempat bersandarnya kapal pesiar. Ada dua kemungkinan yakni membuat FS (*Feasibility Study* -red) untuk dermaga khusus kapal pesiar dan satu lagi dermaga ditambahkan ponton atau dermaga apung," katanya.

Dana mengatakan, kunjungan pihaknya ke Lovina bertujuan melihat kondisi Dermaga Lovina, di mana Disbudpar Buleleng konon baru menerima serah terima barang dari pusat. Tindakan selanjutnya, dari Disbudpar Buleleng akan menyerahkan ke Pemprov Bali berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014. Selain itu, berdasarkan RTRW Provinsi Bali dan RTRW Kabupaten Buleleng, keberadaan Pelabuhan Celukan Bawang hanya digunakan sebagai pelabuhan barang, sedangkan di Lovina jelas termasuk

RTRW pariwisata. Kini telah ada Rencana Induk Pelabuhan (RIP). Artinya, pengembangan pelabuhan di lingkungan pariwisata harus jelas melalui revitalisasi tiga tahap. "Daerah lingkungan pelabuhan di Celukan Bawang, bukan untuk kegiatan pariwisata, khusus untuk bongkar muat barang saja. Seluruhnya mengacu kepada RTRW. Semua akan kami lakukan bertahap," tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Bali Nyoman Tirtawan mengatakan, dirinya mendukung eksekutif membuat FS pembangunan khusus dermaga kapal pesiar. Diharapkan, pembangunan fasilitas itu mampu mendongkrak kunjungan wisatawan ke Bali Utara. "Kami ingin dermaga jetty ini diperbaiki dan bisa dikembangkan jadi dermaga kapal pesiar. Kalau di Celukan Bawang itu khusus untuk bongkar muat barang," ujarnya. (kmb34)



Bali Post/kmb34

**DIKEMBANGKAN - Dermaga Jetty di kawasan pariwisata Lovina Singaraja ini dirancang untuk dikembangkan menjadi dermaga kapal pesiar.**

Edisi : Kamis, 1 Oktober 2015

Hal : 11



## Eksekutif Jelaskan Prinsip Pencairan Hibah

# Tetap Mengacu pada Prinsip Kepatuhan akan Asas Normatif

**PENJABAT** Bupati Badung Ir. Nyoman Harry Yudha Saka, M.M. bersama Sekda Badung Kompyang R. Swandika melakukan rapat bersama unsur pimpinan di DPRD Badung untuk mencari titik temu dalam pencairan dana hibah untuk masyarakat Badung. Dalam rapat yang digelar di ruang Ketua DPRD Badung, hadir Wakil Ketua DPDR Badung I Made Sunarta beserta unsur pimpinan seperti Ketua Komisi III Nyoman Satria, Ketua Komisi II Nyoman Dirgayusa serta pimpinan fraksi-fraksi. Dalam rapat tersebut, Penjabat Bupati memberikan penjelasan normatif terkait dengan prosedur pencairan hibah yang difasilitasi oleh Dewan.

Langkah eksekutif tersebut sebagai wujud responsif dalam up-

aya mencari solusi terbaik terkait penanganan persoalan khususnya pencairan hibah. Mengingat, berdasarkan amanat UU 23 Tahun 2014, di mana pencairan hibah diperuntukkan bagi lembaga yang berbadan hukum Indonesia. Sementara lembaga adat di Bali tidak memenuhi unsur yang dimaksud. Dengan demikian, pertemuan itu dimaksudkan mencari jalan tengah dan tetap mengacu pada prinsip-prinsip kepatuhan akan asas normatif dan akuntabel dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi Bali tengah menyiapkan pergub untuk dapat mencairkan hibah tersebut. Meski demikian, kata Penjabat Bupati, sampai saat ini salinan pergub tersebut belum diterima.

“Langkah kita segera mencari solusi untuk dapat mencairkan hibah ini. Sementara yang bisa dicairkan, hibah yang diperuntukkan bagi desa adat, banjar adat dan subak. Di luar tiga itu, masih tetap kita usahakan untuk dicarikan solusinya,” jelas Yudha Saka.

Dalam rapat yang juga diikuti oleh kepala SKPD di lingkungan Pemkab Badung, Sekda Kompyang R. Swandika juga menjelaskan, pihaknya tidak tinggal diam untuk mencari solusi pencairan hibah tersebut. Bahkan, ia mengaku telah beberapa kali berkonsultasi, baik ke gubernur juga ke BPKP. Sementara terkait pergub, Kompyang R. Swandika menjelaskan, pihaknya belum menerima hal tersebut dalam bentuk pergub. (ad1730)



**RAPAT** - Penjabat Bupati Badung Ir. Nyoman Harry Yudha Saka, M.M. bersama Sekda Badung Kompyang R. Swandika melakukan rapat bersama unsur pimpinan DPRD Badung, Rabu (30/9) kemarin.

Edisi : Kamis, 1 Oktober 2015

Hal : 2



### Kasus Korupsi Pengolahan Pupuk Organik

## Mantan Kadis Pertanian Bangli Jadi Tersangka

Denpasar (Bali Post) -

Sidang dugaan korupsi dana bantuan sosial pengembangan unit pengolahan pupuk organik (UPPO) dengan terdakwa Ketua Kelompok Tani Ternak Bina Winangun, Desa Batur Tengah, Kintamani, Nyoman Juniada (40), Selasa (29/9) kembali dilanjutkan di Pengadilan Tipikor Denpasar. Jaksa penuntut umum (JPU) I Bagus P.G. Agung dkk. menghadirkan sejumlah saksi, termasuk mantan Kadis Pertanian, Perkebunan dan Perhutuan (P3) Wayan Supartana. Bahkan, Kadis ini juga dijadikan tersangka.

Selain itu, terungkap dalam persidangan, saksi lainnya yakni Ketua Tim Teknis Wayan Sadia menerima uang Rp 34 juta. Pada sidang Selasa lalu, terdakwa didampingi pengacara I Made Suardika Adnyana. Terungkapnya mantan Kadis P3 yang kini sudah menjadi Kadis Perikanan dan Peternakan Supartana, lantaran dia menjadi saksi. Pengacara terdakwa menyampaikan posisi Supartana adalah seorang tersangka. "Mohon maaf, kalau bisa pemeriksaan saksi Kadis dipisahkan majelis, lantaran sudah menjadi tersangka

dalam kasus ini," pinta Suardika.

Akhirnya, Wayan Sadia dan kawan-kawan yang lebih awal diperiksa menjadi saksi. Dalam persidangan, terkuak Sadia meminta uang ke terdakwa Rp 34 juta ketika pencairan dana tahap pertama. Hakim Beslin Sihombing juga sempat beberapa kali menghardik saksi-saksi lantaran banyak berkelit. "Anda sebagai tim teknis namun mengaku tidak tahu apa-apa. Kok bisa?" hardik Beslin.

Ketika tersangka Supartana menjadi saksi, langsung ditanyakan terkait dengan uang Rp 34 juta yang diambil Widia ke terdakwa. "Setelah uang cair, Widia mengambil uang Rp 34 juta dengan alasan untuk dibagi-bagi. Apakah bapak dapat?" tanya hakim ke Supartana. Dengan wajah merah, saat itu Supartana menggeleng sambil mengaku tidak tahu dan tidak ada. "Saya tidak tahu-menahu, tidak ada saya dapat bagian," kilahnya.

Usai sidang, pengacara terdakwa memastikan memang Kadis Supartana sudah menjadi tersangka. Suardika mengatakan itu karena memberikan rekomendasi pencairan. (kmb37)

Edisi : Kamis, 1 Oktober 2015

Hal : 2



## KONI Anggarkan Dana Pra-PON Rp 4,4 Miliar

Denpasar (Bali Post) -

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bali menganggarkan dana sebesar Rp 4,4 miliar untuk 45 cabang olahraga (cabor) yang mengikuti ajang Prakuualifikasi PON 2015. Ketua KONI Bali I Ketut Suwandi di Denpasar, Rabu (30/9) kemarin mengatakan, anggaran Rp 4,4 miliar itu berasal dari dana hibah APBD Perubahan tahun 2015.

"Dana itu sudah total dari segala kebutuhan Pra-PON. Dana tersebut dipakai 45 cabang olahraga yang mengikuti ajang Pra-PON. Jadi setiap cabor dibantu kurang lebih sekitar 100 juta rupiah," ungkapnya. Mantan Ketua KONI Badung itu menambahkan, pihaknya berharap semua cabor bisa menerima dan memahami keterbatasan bantuan yang diberikan pihak KONI Bali. Untuk itu, dirinya berharap masing-masing cabor bisa mencari dana tambahan untuk menutupi kekurangan, mengingat KONI Bali tidak bisa membantu cabor dengan sepenuhnya. "Jadi, kami berharap semua cabor bisa memahami jumlah bantuan yang diberikan," ujarnya. (kmb41)

Edisi : KemIs, 1 Oktober 2015

Hal : 16



**Soal Lahan Eks Tiara Grosir**

**Mendag Respons Positif  
Dikelola PD Pasar**

**Denpasar (Bali Post) -**

Rencana PD Pasar Denpasar untuk mengelola lahan eks Tiara Grosir, mendapat tanggapan dari Menteri Perdagangan (Mendag) RI Thomas Trikasih Lembong. Saat berkunjung ke Pasar Badung, Menteri Perdagangan sempat diberikan informasi terkait rencana pengelolaan lahan tersebut. "Pak Menteri menyambut positif rencana yang dilakukan Pemkot Denpasar," ujar Dirut PD Pasar Denpasar I Made Westra, Rabu (30/9) kemarin.

Menteri Perdagangan dalam kunjungan ke Pasar Badung sempat melihat aktivitas pedagang dan pembeli saling berdesakan. Terlebih, kunjungan itu dilakukan pagi hari. Melihat kondisi itu, Menteri Thomas meminta agar Dirut PD Pasar Denpasar melakukan perbaikan atau merevitalisasi los pedagang ikan di lantai satu dimaksud.

Atas desakan itu, Westra menyatakan penataan los tersebut sudah sempat dilakukan. Namun karena jumlah pembeli saat itu sangat banyak, sehingga terlihat sangat kredit. Pada saat itu, Westra juga menjelaskan aset milik Pemkot Denpasar di lahan eks Tiara Grosir. Lokasi itu sudah direncanakan sebagai pasar tradisional yang bersih dan segar. Dikatakannya, dari maket gambar yang sudah rampung, pasar tersebut akan dibuat senyaman mungkin untuk kegiatan UKM, pasar tradisional yang segar dan bersih.

Dari empat lantai yang dirancang, lantai *basement* memang akan diperuntukkan sebagai pasar segar, yakni untuk pedagang daging dan ikan. Sedangkan lantai empat untuk parkir kendaraan, lantai tiga sebagian parkir, perkantoran, serta ruang administrasi. Lantai dua khusus untuk areal UKM dan lantai satu pasar modern. Mendengar penjelasan itu, Menteri Thomas Lembong pun minta diantar untuk melihat lahan eks Tiara Grosir. Pada prinsipnya, Menteri Perdagangan sangat mengapresiasi kebijakan Pemkot Denpasar dalam pengelolaan aset. (kmb12)

Edisi : Kamis, 1 Oktober 2015

Hal : 2



## Tagih Tunggakan PBB

# Pemkab akan Libatkan Kejaksanaan

Bangli (Bali Post) -

Adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebanyak Rp 10 miliar yang belum berhasil ditagih Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan dan Pasedahan Agung menjadi sorotan dewan. Pemerintah daerah diminta segera membentuk tim penyelesaian piutang.

Anggota DPRD Bangli Dewa Gede Oka, Rabu (30/9) kemarin menjelaskan pembayaran pajak secara tepat waktu akan mampu memberikan angin segar bagi daerah. Sebab, dana ini bisa dijadikan sebagai salah satu pendukung untuk mempercepat pembangunan. Namun, jika dihadapkan dengan kondisi sekarang, yakni adanya tunggakan PBB yang telah terjadi selama bertahun-tahun, secara tidak langsung akan menyebabkan pembangunan terhambat lantaran terbentur anggaran. "Pajak yang dipungut ini kan bisa dijadikan anggaran untuk pembangunan. Kalau lama menunggak, secara otomatis pembangunan akan tersendat," katanya.

Menurut Dewa Oka, agar tunggakan pajak tak terus berlangsung, Dispenda perlu segera membentuk tim penyelesaian piutang yang melibatkan lembaga lainnya. "Pemerintah Daerah perlu segera membentuk tim untuk menyelesaikan piutang ini,

agar penagihan bisa dilakukan lebih cepat," tegasnya.

Disampaikan, perlunya pembentukan tim ini, tak lain untuk menyikapi imbauan pemerintah provinsi agar pemerintah daerah segera menyelesaikan piutang ini. "Apalagi waktu ini tunggakan pajak jadi asistensi gubernur. Itu harus segera disikapi, salah satunya dengan membentuk tim itu," katanya. Politisi Gerindra ini juga menyampaikan jika nantinya dalam penagihan piutang ini ada masyarakat yang keberatan, tim diminta tidak sungkan-sungkan untuk menyelesaikannya melalui lembaga hukum. "Kalau penunggak itu bandel, bawa saja ke lembaga hukum," ujarnya.

Selain Dewa Oka, adanya tunggakan PBB selama bertahun-tahun ini juga menjadi sorotan Wakil Ketua DPRD Bangli I Komang Carles. Ia menilai, penanganan tunggakan pajak ini belum berjalan secara maksimal. "Sangat disayangkan adanya tunggakan pajak yang

terjadi selama bertahun-tahun," katanya.

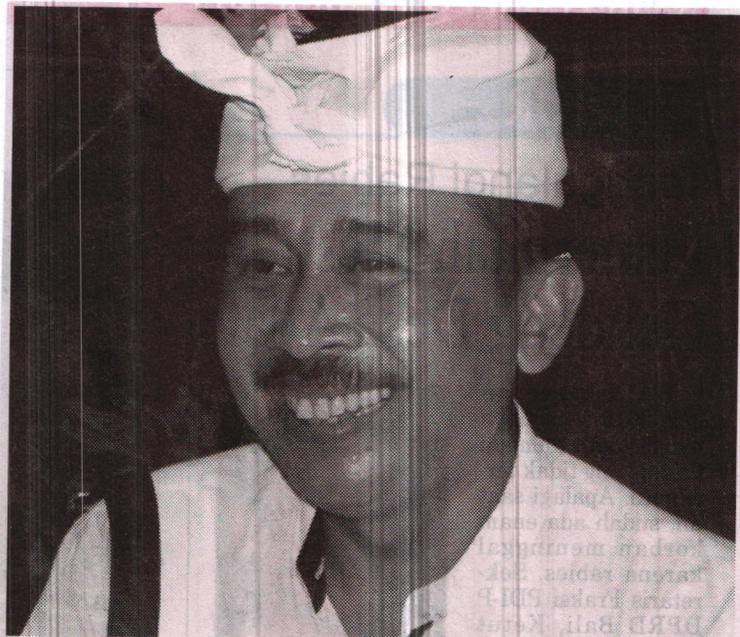
Selain PBB, tunggakan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) juga perlu disikapi secara serius. Sebab, jika tunggakan itu berhasil ditagih, nantinya bisa digunakan untuk membenahi objek pariwisata, salah satunya Penelokan yang hingga kini masih semrawut. "Tunggakan PHR juga perlu disikapi," pinta politisi Demokrat asal Kintamani ini.

Lanjut Carles, upaya penagihan piutang ini, selain dengan membentuk tim, instansi terkait perlu juga menjalin komunikasi secara intens dengan aparat desa. Sebab, bukan tidak mungkin adanya tunggakan pajak ini karena masyarakat kurang memahami prosedur pembayaran.

"Komunikasi dengan aparat desa ini yang penting. Dia yang paling tahu kondisi masyarakatnya," ungkapnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan dan Pasedahan Agung Gd. Suryawan mengaku sudah mempersiapkan tim penyelesaian piutang ini dan



Sambungan



**Dewa Gede Oka**

kini masih tahap pematapan. "Kami sudah mmeperiapkan tim ini. Kita perlu buat embrionya dulu. 2016 tim ini ditargetkan sudah bisa kerja," cetusnya.

Selain melibatkan SKPD terkait, penyelesaian piutang ini juga bekerja sama dengan Kejaksaan. Artinya, jika ada kesulitan

penagihan piutang dan harus memerlukan suatu ketentuan, Dispenda bisa berkonsultasi dengan kejaksaan dari segi hukumnya. "SKPD terkait juga kami libatkan dalam tim itu. Kerja sama dengan Kejaksaan juga ada," ucap mantan Kepala Inspektorat ini. (kmb45)

Edisi : Kamis, 1 Oktober 2015

Hal : 8



## Terkendala Personel Damkar Nusa Penida Tak Kunjung Dikirim

### Semarapura (Bali Post) -

Armada pemadam kebakaran (damkar) untuk operasional di Nusa Penida tidak kunjung dikirim. Terbatasnya jumlah personel menjadi kendala belum beroperasinya damkar di kecamatan ini. Untuk itu, Kasi Damkar Dinas Pekerjaan Umum Klungkung I Wayan Toya mengajukan kajian untuk pengadaan personel beserta

kelengkapannya.

Toya menjelaskan, armada Damkar Nusa Penida telah tiba 17 Agustus lalu. Mobil seharga Rp 1 miliar lebih tersebut saat ini masih ditempatkan di Dinas PU Kabupaten Klungkung, sebab pihaknya baru saja mengajukan surat kajian ke Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta.

Kajian tersebut untuk mengajukan personel yang akan

ditempatkan di Kecamatan Nusa Penida. Ia mengajukan 21 personel tambahan di luar yang sudah ada untuk bertugas dalam tiga *shift* selama 24 jam. "Kajiannya sudah ada di meja Pak Bupati," ujar Toya ditemui di Kantor Bupati Klungkung, Rabu (30/9) kemarin.

Selain masalah personel, lanjutnya, hingga sekarang belum ada kantor khusus untuk men-

empatkan armada dan personel damkar di Nusa Penida. Meski begitu, pihaknya memastikan armada damkar akan diposisikan di kantor camat setempat. "Kalau kajian sudah disetujui, diperkirakan pada November atau Desember, armada sudah bisa dioperasikan di Nusa Penida," bebernya.

Petugas yang akan ditempatkan di Nusa Penida nantinya

dilengkapi dengan peralatan keamanan seperti helm, jaket, dan sepatu. Mereka dipastikan dapat beroperasi hingga ke pelosok-pelosok Nusa Penida. Hanya, wilayah Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan tidak bisa dijangkau, mengingat terpisah lautan. "Pada tahun anggaran 2016 baru kami adakan armada di Nusa Lembongan," ungkap Toya. (dwa)

Edisi : Kamis, 1 Oktober 2015

Hal : 10